

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan paling menjadi perhatian dunia demikian juga bagi negara Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Menurut Supriatna (1997: 90) suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda secara cukup dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2013) lebih lanjut BPS menyebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) mengemukakan bahwa indikator kemiskinan ditandai dengan: Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; kurangnya kemampuan membaca dan menulis; kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; dan akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas. Keseluruhan indikator tersebut memberi penjelasan yang sama atas sebuah fenomena yaitu menunjukkan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh seseorang. Dengan melihat karakteristik ini, maka kemiskinan akan lebih mudah dikenali karena mengandung sifat khas dan kekhususan yang dapat menjadi pembeda dan ciri dengan kondisi sosial lainnya.

Problem kemiskinan sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang tepat bagi tatanan pemerintah nasional maupun internasional. Berbagai program dilakukan pemerintah untuk menangani kemiskinan yang terjadi, program penanganan dan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak hanya berasal dari pemerintah melainkan juga dari lembaga sosial, seperti lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga pengelola zakat maupun lembaga pengelola program *corporate social responsibility* (CSR) yang berasal dari perusahaan milik pemerintah maupun non pemerintah atau perusahaan swasta. Program ini merupakan salah satu bentuk program yang dilakukan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah pemberian pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Karanganyar diperlukan kerja keras dan ditangani lintas sektoral termasuk memaksimalkan peran tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) maupun peran tanggungjawab sosial lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Karanganyar. Keterlibatan BAZNAS Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, karena data terakhir masih ada penduduk miskin tahun 2013 sebesar 13,58 persen dan berangsur turun pada tahun 2014 sebesar 12,62 persen tahun 2015 sebesar 12,46 persen tahun 2016 sebesar 12,49 persen tahun 2017 sebesar 12,28 persen dan tahun 2018 sebesar 10,01 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar berjumlah 879.078 jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2018).

Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan kemiskinan. Hal ini selaras dengan salah satu program yang menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Persoalan kemiskinan kini telah menjadi prioritas utama program pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut terbukti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025, (Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009)

kemiskinan merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan pola penurunan sebagaimana data di atas. Namun sangat sedikit penurunannya, kecuali tahun 2018 yang turun 12,28 persen menjadi 10,01 persen meskipun berbagai usaha Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menekan kemiskinan sudah maksimal, namun tingkat kemiskinan masih tinggi. Guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi, perlu terlebih dulu mengetahui tentang kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya dan program pembangunan pemberdayaan masyarakat. Pengertian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai metode yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang mempengaruhi hidupnya (Suharto, 2010: 38).

Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Karanganyar salah satunya diluncurkan program pencapaian 10.000 wirausahawan mandiri (misi ke dua) dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar meluncurkan program Kesehatan gratis (misi ke tiga) sebagaimana tertuang dalam Visi Misi Kepala Daerah Karanganyar yaitu Visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2013-2018 “Bersama memajukan Karanganyar”. Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 adalah: pembangunan infrastruktur menyeluruh; pencapaian 10.000 wirausahawan mandiri; pendidikan gratis SD, SMP, SMA/SMK dan kesehatan gratis; pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan; dan peningkatan kualitas keagamaan dan sosial budaya (Peraturan Daerah No. 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, 2014-2018).

Beberapa langkah telah ditempuh yaitu salah satunya pendataan pada rumah tangga sasaran dan pemberian program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Sehingga penurunan angka kemiskinan tahun 2013 yang masih sebesar 13,58 persen, secara berangsur dapat menurun melalui pembinaan, pemberian modal usaha, pemberian fasilitas usaha maupun kemitraan sejalan

dengan program pemerintah. Berbagai program lainnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan, sehingga Kabupaten Karanganyar telah berhasil menurunkan angka kemiskinan berangsur turun menjadi 10,01 persen ditahun 2018 di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,32 persen (BPS Provinsi Jateng Prosentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng 1996-2018).

Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Karanganyar, belum diikuti kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Bahkan kesadaran masyarakat dari hasil awal penelitian menunjukan data bahwa masih banyak yang membuang sampah di sungai, di pasar, di lahan kosong dan di pinggir jalan. Belum ada kesadaran terhadap pemilahan sampah rumah tangga dan masih banyak perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Sedangkan dari sisi penyediaan sarana sanitasi menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang belum memiliki jamban keluarga sendiri sehingga kadang kalau buang air besar (BAB) masih menumpang tetangga yang dekat maupun ke tempat saudara terdekat, ada juga yang ke masjid, fakta lain menunjukan bahwa mereka telah memiliki jamban tetapi belum permanen dan tidak sehat (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Laporan pada Rakor STBM November 2013).

Masyarakat miskin biasanya hidup dalam lingkungan yang tidak layak dimana kesadaran dan perilaku hidup sehat mereka sangat rendah. Banyak dari mereka yang kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan, termasuk sanitasi dan air minum. Salah satu karakteristik dari kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh BPS adalah tidak adanya fasilitas buang air besar (BAB) seperti jamban keluarga dan sanitasi air limbah dalam sebuah rumah tempat tinggal. Masih menurut BPS bahwa dari aspek sanitasi, sebuah rumah bisa dikatakan sehat dan layak apabila memiliki fasilitas jamban lengkap dengan sistem pengolahan air limbahnya. Kurangnya air bersih dan sanitasi yang tidak memadai, bukan hanya menjadi masalah bagi masyarakat Karanganyar saja tetapi sudah menjadi masalah di Indonesia dan juga masalah dunia.

Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa fasilitas sanitasi yang buruk dapat melemahkan sebuah komunitas, karena bisa menurunkan kesehatan publik

dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Dua dari empat penyebab kematian dibawah usia lima tahun terbesar yakni diare dan tipus merupakan penyakit yang tersebar karena kotoran dan timbul akibat keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi dan perilaku higienis (World Bank 2013)

Terkait dengan masalah Sanitasi juga berkaitan erat dengan *stunting*. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan 1 dari 3 anak Indonesia menderita *stunting*. Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan *stunting* sebesar 27%. Jika intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi dan kebersihan dapat menyebabkan potensi *stunting* berkurang. (Pokok-pokok Hasil Riset Dasar, Kemenkes RI 2013). Sanitasi buruk tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi negara. Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 triliun pertahun akibat kondisi sanitasi yang buruk untuk membayar ongkos pengobatan dan akomodasi. Dalam penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan STBM karena masyarakat selain sebagai obyek juga menjadi pelaku *hygiene* dan sanitasi. Akibat dari perilaku BABS akan menjadikan lingkungan tidak sehat yang kemudian akan memunculkan penyakit yang akhirnya dapat mengurangi produktifitas masyarakat disekitarnya. Rendahnya produktifitas akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Maka keterbatasan sarana jamban keluarga dan perilaku BABS dapat berdampak buruk pada sanitasi dan keterbatasan air bersih, perlu diungkap dan dipelajari untuk kemudian bisa diambil relevansinya dalam proses pengambilan program kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015–2030, SDGs berisi seperangkat tujuan *transformatif* yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Salah satu tujuan SDGs adalah: Menjamin ketersediaan serta Manajemen Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (Tujuan ke 6). Hal ini sekaligus sebagai kerangka acuan untuk mengintegrasikan SDGs dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan 6, adalah konsep dasar tentang air bersih dan sanitasi layak dipandang sebagai kebutuhan

dasar manusia. Salah satu nilai penting dalam tujuan SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses menyeluruh tentang air bersih dan sanitasi.

Sejalan dengan konsep dan tujuan 6 SDGs tersebut maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menjadikan program perbaikan sanitasi dan air bersih sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai;

“Sanitasi dan air bersih merupakan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi dan air bersih adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan manusia, meliputi air minum, *hygiene* dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan manajemen pengelolaan sumber air”, (Menkes RI, Nila Moeloek, pada Rapat Kerja Nasional September 2014);

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan ke 6 SDGs dengan menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang selanjutnya direalisasikan melalui penetapan Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019 dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Guna mewujudkan program tersebut, maka Kemenkes dan beberapa kementerian bersama mitra kerja yang lain telah meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 2008. Pada program ini ada 5 pilar STBM, yaitu; 1) Stop BAB sembarangan (SBS); 2) Cuci tangan pakai sabun; 3) Pengelolaan air minum dan makanan; 4) Pengelolaan sampah; dan 5) Pengelolaan limbah cair.

Sebagai realisasi dan refleksi atas program nasional STBM, maka pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM dengan berbagai model dan pola masing-masing. Namun demikian dalam upaya pelaksanaan dan percepatan program STBM sejalan dengan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) maka pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan STBM karena masyarakat selain sebagai objek juga menjadi pelaku higienis dan sanitasi.

Sejak awal pelaksanaan RPJMN, pemerintah Indonesia telah mengajak peran aktif dari unsur non-pemerintah dalam pengadaan air bersih. Unsur non-

pemerintah yang dimaksud adalah *filantropi* (Dermawan) dan pelaku usaha, akademisi dan tenaga ahli, serta organisasi masyarakat sipil dan media massa. Hal ini bermaksud agar penyediaan sarana sanitasi dan air bersih diberbagai daerah yang kesulitan dan mengalami krisis air bersih dapat diupayakan lewat kerja sama pemerintah setempat dengan berbagai lembaga sosial lokal yang mempunyai komitmen dalam pemberdayaan masyarakat, maupun lembaga/perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta dengan CSR.

Akan tetapi, upaya dari sisi pembuat kebijakan saja tidaklah cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Sehebat apa pun pembangunan sarana prasarana untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak tidak berhasil sesuai yang diharapkan, jika perilaku hidup sehat belum dihayati masyarakat. Sungai yang kotor, berbau, penuh sampah, terbatasnya sarana jamban keluarga dan masih banyak masyarakat yang berperilaku BABS selalu menjadi pemandangan umum yang ditemui sehari-hari. Warga yang tinggal di bantaran sungai menggantungkan hidup dari air tersebut, begitupun masih ditambah pencemaran sungai oleh limbah pabrik, pola hidup sehat masih jauh dari kata ideal bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Kabupaten Karanganyar sukses dalam menurunkan angka kemiskinan namun belum diikuti oleh perilaku masyarakat, keterbatasan kepemilikan jamban keluarga dan keterbatasan sarana sanitasi dan air minum yang sehat. Fakta menunjukkan bahwa masih adanya penduduk miskin, dari kesehatan lingkungan masih kurangnya sarana jamban keluarga yang layak, masih banyak masyarakat yang berperilaku BABS kondisi ini diperkuat dengan fakta di lapangan masih terdapat kepala keluarga (KK) berperilaku BABS 12,40 persen; KK yang sudah akses jamban sehat baru mencapai 87,60 persen; KK yang sudah memiliki jamban sehat dan permanen baru mencapai 71,20 persen (Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar November 2013).

Di Indonesia, program sanitasi pada awalnya mengalami *stagnasi*. Hasil evaluasi, banyak proyek sanitasi yang gagal, padahal penyampaian program sanitasi terutama jamban sehat telah lama dilakukan. Keadaan ini disebabkan antara lain karena pembangunan masih berorientasi pada target fisik serta belum

berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap persoalan proyek sanitasi cenderung menurun pada paska proyek dan kurangnya kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sanitasi. Kecenderungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah juga masih tinggi. Hal ini memicu untuk melaksanakan program yang lebih baik dari sebelumnya (Rahmawati, 2013: 138).

Upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mencukupi kebutuhan sanitasi dasar terutama pada penyediaan jamban keluarga dalam program jambanisasi. Pada awal penelitian ditemukan permasalahan yang dilematis yaitu adanya kesenjangan pada akses pelayanan kesehatan khususnya bidang sarana kesehatan termasuk pelayanan kebutuhan jamban keluarga, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkeinginan untuk segera menuntaskan program jambanisasi dengan layanan bantuan jambanisasi kepada semua masyarakat, dan masyarakat sendiri menunggu keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun tampaknya mengalami sedikit kesenjangan atau kebuntuan dalam akses pelayanan secara menyeluruh. Di samping keterbatasan dana dari pemerintah dalam menjangkau seluruh masyarakat, juga terkendala oleh masalah birokrasi klasik yaitu persyaratan akses dana Pemerintah Kabupaten Karanganyar bila melalui dana APBD diperlukan prosedur persyaratan yang terkadang rumit dan tidak terjangkau bagi semua masyarakat, seperti persyaratan status kepemilikan rumah bagi yang masih kontrak atau menyewa dan status kepemilikan tanah yang ditempati dengan status *mager sari*. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan kehadiran lembaga sosial lokal yang mampu sebagai *pioneer* dalam menjembatani kebuntuan atau kesenjangan akses pelayanan sarana kesehatan khususnya dalam bantuan pengadaan jamban keluarga guna percepatan program jambanisasi masyarakat.

Upaya dan strategi mengatasi bantuan jambanisasi bagi masyarakat miskin/kurang mampu dan upaya mencari jalan dalam kebuntuan atau kesenjangan akses pelayanan sarana kesehatan antara pemerintah dan masyarakat yang tidak mampu merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, dan lintas lembaga. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

merupakan salah satu lembaga pemerintah di Kabupaten Karanganyar yang ada dan telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan dan pelayanan kesehatan.

Maka dalam strateginya, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan beberapa perangkat daerah termasuk dengan lembaga non pemerintah termasuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan perusahaan milik daerah BUMD maupun perusahaan swasta yang berpotensi dalam pemanfaatan dana CSR. Melalui beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan penanganan sanitasi khususnya sarana jambanisasi secepatnya melakukan koordinasi intensif guna menemukan format dalam percepatan program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar. Keterlibatan perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR merupakan salah satu program operasi bisnis dan memiliki komitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara *holistik* melembaga dan berkelanjutan (Suharto, 2007: 16).

Dilandasi atas kesadaran bersama antara umat Islam dengan Pemerintah Daerah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS) demi kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Karanganyar, maka pada tanggal 12 Januari 1993, terbentuk Forum Komunikasi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Karanganyar dengan maksud membantu memecahkan masalah-masalah keagamaan, kependidikan, keremajaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil forum ini adalah terbentuknya Badan Amil Zakat *Infaq* dan *Shodaqoh* Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat dengan BAZIS. Maka tujuan utama didirikannya BAZIS adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang beragama Islam khususnya, melalui pengumpulan ZIS, untuk dikelola dan didayagunakan sesuai ketentuan hukum maupun syariat islam, dalam rangka membantu memecahkan masalah ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemuda, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya lembaga BAZIS oleh Bupati Karanganyar dikukuhkan kepengurusannya melalui Surat Keputusan Bupati

Nomor: 451.1/3 tahun 1993 tertanggal 29 Januari 1993 tentang Pembentukan BAZIS Kabupaten Karanganyar.

Keberadaan lembaga sosial keagamaan BAZIS diawal pendirian masih banyak pada tataran sosialisasi kelembagaan dan orientasi program BAZIS, belum banyak mengelola keuangan. Keberadaan BAZIS juga belum banyak dikenal dan belum banyak menerima dana dari para *Muzzaki* (penyetor dana ZIS) dan masih perlu pemahaman melalui sosialisasi dan koordinasi. Maka dalam perkembangannya tahun 2014 terdapat peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia. Melalui ketentuan ini maka diatur proses peralihan nama kelembagaan sekaligus mengawali pula manajemen pengelolaan BAZIS menjadi BAZNAS, sehingga secara struktur dan kelembagaan BAZNAS dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota memiliki kesamaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping dengan peningkatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat, juga didukung oleh kesehatan masyarakat agar kegiatan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Maka pengelolaan BAZIS yang berubah menjadi BAZNAS dan bekerja sama dengan pemerintah dan CSR perusahaan diharapkan mampu membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Kajian ini ingin mengetahui langkah dan kinerja BAZNAS dalam memberikan dampak positif dan menjembatani kesenjangan akses pelayanan jamban keluarga antara pemerintah dengan masyarakat yang kurang mampu dan sekaligus sebagai upaya membantu program pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan kesehatan gratis melalui pilar stop BABS guna mendukung program STBM di Kabupaten Karanganyar. Berkaitan dengan bantuan sosial maka Gilbert dan Specht (1981: 57) menjelaskan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang memberikan

informasi berupa petunjuk perencanaan atau petunjuk kegiatan kepada pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat.

Kinerja BAZNAS Kabupaten Karanganyar selalu berkomitmen untuk membantu program pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya terhadap program-program pembangunan yang sejalan dengan visi BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu “Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan profesional” selanjutnya dalam mewujudkan visi tersebut salah satu dari empat misi yang dimiliki yaitu: memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergisitas dan koordinasi dengan lembaga terkait (misi ke empat), sedang untuk membantu program kesehatan gratis maka BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah memiliki salah satu program BAZNAS pada rumusan nomor dua yaitu “Program Karanganyar Sehat”.

Melalui visi dan misi tersebut maka tugas dan kinerja BAZNAS sebagai pengelola dana ZIS yang meliputi tugas dan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS. Semuanya dirancang dan dievaluasi melalui Rapat kerja tahunan dilaksanakan secara konsisten dan dalam rangka membangun kerjasama dan membangun kepercayaan dengan para *muzzaki* (penyetor dana ZIS) maupun dengan para *mustahiq* (penerima manfaat pengelolaan dana ZIS).

Berdasarkan hasil pengumpulan ZIS yang dikelola BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar menempati peringkat pertama dengan penghimpunan dana ZIS satu tahun sebesar Rp15.456.043.434,- (tahun terakhir 2018). Penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar selama tahun (2008-2018) secara berturut-turut adalah Rp 939.573.628 (2008); Rp 1.296.053.827 (2009); Rp 1.924.785.145 (2010); Rp2.199.574.591 (2011); Rp 2.822.002.329 (2012); Rp3.781.618.810 (2013); Rp 5.550.637.502 (2014); Rp 6.867.035.797 (2015); Rp 10.200.450.000 (2016); Rp 13.200.000.000 (2017); Rp 15.456.043.434 (2018). Dari data tersebut dapat dilihat perkembangan penghimpunan dan pengelolaan setiap tahun selalu

meningkat (Laporan akhir tahun 2018 Penghimpunan ZIS, Buletin BAZNAS Edisi Desember, 2018).

Melihat perkembangan dalam pengumpulan dana ZIS membuktikan BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu mengelola dana ZIS dengan program pendistribusiannya mendapat respon positif dari para *muzzaki* melalui pemahaman dan sosialisasi, yang terus dilakukan secara terjadwal kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan Perusahaan serta melalui jalur teritorial Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Karanganyar. *Pentashorufan* (pendistribusian) dana ZIS oleh BAZNAS secara rutin dilakukan melalui berbagai program berupa bantuan mesin jahit; bantuan wirausaha; bantuan usaha mandiri; bantuan modal usaha; gaduh ternak sapi; bantuan ternak kambing; pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu; serta bantuan layanan kesehatan berupa, poliklinik gratis, layanan mobil ambulan gratis, bantuan layanan program STBM berupa sarana air bersih (pembuatan sumur boor), jamban sehat gratis, dan layanan sedot lumpur tinja gratis. Khusus bantuan jamban keluarga dalam program jambanisasi akan menjadi bahasan khusus dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan keterlibatan CSR perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan lingkungan dengan prioritas percepatan program jambanisasi menuju stop buang air besar sembarangan (SBS) di Kabupaten Karanganyar. Dengan prioritas program ini diharapkan di Kabupaten Karanganyar segera terpenuhi kebutuhan jambanisasi menyeluruh dan berkelanjutan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berperilaku BABS.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan zakat *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS) akan mampu membantu program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat serta peningkatan derajat kesehatan yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ZIS merupakan potensi yang masih belum disentuh secara maksimal dan perlu dibangkitkan serta dikelola secara baik melalui lembaga yang legal dan profesional. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan BAZNAS dan pemanfaatan dana

CSR merupakan upaya mengatasi kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Program kerja yang dibuat bersama untuk masyarakat agar dapat mengurangi pengangguran tunjangan pendidikan, kesehatan, dan kerentangan sosial, karena semua organisasi bergantung pada lingkungan sehingga perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat (Kast, 2003: 212).

Pemerintah Pusat, Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, program layanan kesehatan, dan layanan sosial masih mengalami berbagai kendala, penyebabnya antara lain perbedaan persepsi kebijakan dan kurang keterpaduan program pemerintah dengan berbagai Departemen/Kementerian ditingkat pusat dan berbagai organisasi Perangkat Daerah termasuk kurangnya keterpaduan dengan lembaga-lembaga non pemerintah termasuk kurang keterpaduan pengelolaan CSR bagi perusahaan-perusahaan swasta. Masih adanya upaya pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial yang belum menemukan model secara tepat serta pendekatan pembangunan masyarakat yang kadang-kadang masih mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat bahkan diabaikan dalam tataran manajemen pengelolaan dan kinerjanya, sehingga pengelolaan zakat kurang mendapat respon positif baik oleh *muzzaki* maupun *mustahiq*.

Oleh karena itu kinerja BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana ZIS melalui program dan strateginya. Pada penelitian ini diharapkan mampu menemukan model pemberdayaan yang menjadikan masyarakat mampu merubah perilaku dan mampu mandiri menuju masyarakat yang meningkat ekonominya, dan derajat kesehatannya serta mendapat respon positif bagi para *muzzaki* dan para *mustahiq*.

B. Rumusan Masalah

Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar dibanding rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah belum diikuti dengan tingkat kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar, bahkan kesadaran masyarakat menunjukkan data bahwa masih banyak perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai, di pasar, di lahan kosong dan di pinggir jalan; belum ada kesadaran terhadap pemilahan sampah rumah tangga dan masih banyak

perilaku buang air besar sembarangan (BABS), dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sedot lumpur tinja secara rutin dan terjadwal pada Jamban keluarga maupun jamban komunal yang berada di instansi, lembaga, sekolahan, masjid, mushola, gereja dan sarana jamban pada fasilitas umum yang lainnya, sedang dari sisi penyediaan sarana sanitasi menunjukkan bahwa, kepala keluarga (KK) masih berperilaku BABS 12,40 persen; KK yang sudah akses jamban sehat 87,60 persen; KK memiliki jamban sehat permanen 71,20 persen; (Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar November 2013)

Program STBM adalah satu-satunya program gerakan sanitasi yang menysar langsung ke tingkat rumah tangga, Program nasional ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku *higienis* dan sanitasi dengan metode pemicuan, sehingga STBM berfokus pada perubahan perilaku dan menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Kepmenkes RI. No 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar telah dicanangkan sejak tahun 2014 melalui program Pemicuan dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan lima pilar STBM.

Kebijakan dan program pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD khususnya bidang kesehatan gratis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan melalui program STBM dengan penetapan pilar pertama jambanisasi atau pilar stop BABS. Hal ini Menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah berkomitmen untuk mendukung program nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang selanjutnya direalisasikan melalui penetapan Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebagai upaya untuk mencapai akses menyeluruh pada akhir tahun 2019 sebagaimana pada RPJMN 2015-2019 dan sebagai upaya mewujudkan Tujuan 6 SDGs yaitu, “Menjamin ketersediaan Manajemen Air dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”.

Namun dalam upaya mempercepat program jambanisasi selesai tahun 2017, Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengalami permasalahan

mendasar yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga dan masih banyak masyarakat berperilaku BABS, sehingga dalam menyelesaikannya perlu bekerja sama dengan lembaga partner untuk bermitra dalam pengadaan dan pendanaan jamban keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu, kendala yang ada bukan hanya masalah keterbatasan dana APBD tetapi ada kendala mendasar yang terkait dengan akses bantuan APBD yang memuat persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak bisa dijangkau bagi semua masyarakat seperti, pada persyaratan kepemilikan rumah dan persyaratan status tanah atas rumah yang ditempati bagi keluarga yang kurang mampu.

Maka untuk percepatan program jambanisasi masih perlu disinergiskan dengan program tanggungjawab sosial dari kelembagaan pemerintah/non pemerintah seperti Program BAZNAS dan program-program sektor swasta dengan memanfaatkan dana CSR dari perusahaan sehingga antara *stakeholders* tidak bekerja sendiri-sendiri yang dirasa kurang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat, permasalahan sering terjadi satu orang atau satu kelompok masyarakat mendapatkan berbagai bantuan dan pembinaan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, dari lembaga seperti BAZNAS maupun dari CSR perusahaan dan juga dari lembaga donor lainnya. Disisi lain masih banyak warga masyarakat di pedesaan yang belum tersentuh bantuan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. maka program pemerintah dan model pengelolaan zakat serta pelibatan CSR perlu disinergiskan dalam satu program yang mampu menjangkau sasaran pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Berangkat dari beberapa hal yang terkait permasalahan kesehatan lingkungan tersebut, dan rumitnya melihat proses dan akses bantuan dari APBD maupun bentuk dan pola sinergisitas kelembagaan dengan program Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam layanan sarana kesehatan khususnya bantuan jamban keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu, maka salah satu fokus penelitian ini adalah mendalami upaya mengatasi kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan warga masyarakat yang tidak mampu membuat jamban secara mandiri dengan penerapan kebijakan pemerintah dan kinerja BAZNAS serta pelibatan CSR dalam percepatan program

jambanisasi di Kabupaten Karanganyar. Guna memahami dan mendalami upaya upaya dalam mengatasi kesenjangan pelayanan sarana kesehatan tersebut.

Peneliti dalam mengkaji kondisi yang ada dan menganalisa data menggunakan teori dasar tindakan sosial, dan teori motivasi berdasarkan kebutuhan, didukung dengan beberapa teori seperti Efektivitas, Perubahan Perilaku, dan Kemiskinan, sedangkan untuk aplikasi dilapangan dikaitkan dengan beberapa teori seperti Pemberdayaan Masyarakat, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), Teori *Stakeholder* dan teori lain yang terkait pelaksanaan program jambanisasi. Melalui kajian tersebut diharapkan peneliti menemukan nilai dan model pemberdayaan yang mampu menyelesaikan permasalahan kesenjangan dalam rangka percepatan program jambanisasi. Permasalahan tersebut sangat perlu untuk diangkat guna mengetahui secara mendalam mekanisme kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelibatan CSR dan kinerja BAZNAS dalam menjembatani kesenjangan akses layanan sarana kesehatan antara pemerintah dengan masyarakat miskin/kurang mampu, sekaligus untuk mengetahui peran BAZNAS sebagai penghubung antara *muzzaki* dengan para *muztahiq* dalam pemanfaatan zakat pada program jambanisasi.

Bertolak dari berbagai respon positif dari pemangku kepentingan di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang dalam penelitian ini disebut dengan istilah BAZKAR, dan adanya program jambanisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pelibatan CSR BANK JATENG maka ada prospek untuk mengkaji beberapa hal terkait kinerja BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat melalui program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar dalam hal:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan keterlibatan CSR BANK JATENG dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi?
2. Bagaimana efektivitas kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi?
3. Bagaimana perilaku *mustahiq* dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi?
4. Bagaimana implementasi pemberdayaan melalui kinerja BAZKAR?
5. Bagaimana model pemberdayaan dalam program jambanisasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dan direncanakan dengan judul "Kinerja BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar". Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk memperoleh gambaran tentang kinerja BAZNAS dan keterlibatan CSR BANK JATENG dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Karanganyar dengan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan keterlibatan CSR BANK JATENG dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi.
2. Mengkaji efektivitas kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi.
3. Mengkaji perilaku *Mustahiq* dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi.
4. Mengkaji implementasi pemberdayaan melalui kinerja BAZKAR.
5. Menganalisis model pemberdayaan melalui program jambanisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis yang berupa model kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan prinsip, proses dan bidang, sehingga terwujud keberdayaan berupa peningkatan derajat kesehatan melalui program jambanisasi khususnya pilar stop BABS di Kabupaten Karanganyar dengan pendekatan konsep kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan keterlibatan CSR BANK JATENG dan efektivitas kinerja BAZKAR serta konsep perubahan perilaku bagi para masyarakat penerima manfaat (*mustahiq*).
2. Praktisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi.

E. Kebaruan Penelitian

Upaya peneliti dalam memperoleh informasi kebaruan dan keaslian penelitian melalui penelusuran (*tracking*) yang pernah dilakukan oleh peneliti lain (dahulu), secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sisi manfaat zakat, melalui pengelolaan oleh beberapa lembaga pengelola, dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi islam yang mengikat *muzzaki* mentransfer dari sebagian kekayaan mereka, sehingga zakat dapat berkontribusi pada peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pengembangan sosial. Sedangkan dari sisi pengelolaan CSR hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa peran CSR melalui kebijakan perusahaan yang dimilikinya sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan keberlanjutan perusahaan. Dari kesimpulan umum tersebut maka beberapa pola dan manfaat pengelolaan zakat dan pelibatan CSR dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat disajikan rangkuman dari beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Beik dan Arsyanti (2016: 141-160) menganalisis peran produktivitas program zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan *mustahiq* (penerima zakat) dari perspektif dimensi spiritual dan material. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa program zakat dari BAZIS dan Dompet Dhuafa DKI Jakarta memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi *mustahiq*. Tingkat spiritual *mustahiq* meningkat 13,09 persen; indeks kesejahteraan meningkat 96,8 persen dan indeks kemiskinan mengalami penurunan 30,15 persen.
2. Penelitian yang dilakukan Sarea (2012: 242-245), menjelaskan kebutuhan Zakat sebagai sistem keuangan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat sebagai pembanding untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi terutama dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

3. Penelitian yang dilakukan Siswantoro dan Nurhayati (2012: 293-312), menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi untuk sebagai deduksi pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor kepercayaan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Faktor kepuasan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Motivasi merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi responden untuk melakukan zakat. Usia, pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki hubungan positif dengan kemampuan membayar zakat.
4. Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Suhaib (2011: 85-91), mengidentifikasi secara sistematis akar penyebab di balik kinerja sistem zakat yang goyah dan mencoba untuk menghilangkannya dengan merancang sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental. Hasil penelitian menunjukan bahwa Zakat sebagai komponen penting dari Sistem Ekonomi Islam yang mengikat orang kaya untuk mentransfer 2,5 persen dari kekayaan mereka kepada masyarakat miskin dan melalui penerapan yang tepat dari sistem Zakat sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan. Sistem zakat telah mengalami beberapa modifikasi sebagai akibat dari dominasi barat yang berkepanjangan dan munculnya pandangan sekuler, studi terbaru telah menyarankan beberapa model implementasi zakat yang dapat meremajakan keberhasilan masa lalu tetapi gagal melakukannya, karena kurangnya jalur yang jelas dan adanya penolakan untuk membangun sistem zakat atas dasar prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam.
5. Penelitian yang dilakukan Noor et al., (2015: 282-286), bertujuan untuk mengukur kinerja multidimensional dari organisasi zakat. Dimensi tersebut meliputi input, proses, *output* dan *outcome*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi zakat melalui peningkatan kemampuan dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk peningkatan kualitas hidup.
6. Penelitian yang dilakukan Yaacob et al., (2013: 1-20), menguji pengelolaan zakat di wilayah Johor dan memfokuskan pada distribusi penerimaan zakat melalui keterlibatan program *commit to user* pengembangan sosial. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif apabila ada partisipasi dari masyarakat dengan cara ada keterlibatan aktif dalam berbagai program pengembangan sosial.

7. Penelitian Abdelbaki (2013: 133-154) Zakat dapat menghilangkan kemiskinan di negara-negara muslim dan mencapai keadilan yang diinginkan dalam distribusi pendapatan serta berperan penting dalam memperbaiki kesehatan dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bahrain.
8. Penelitian Johari et al., (2015: 336-363), menganalisis hubungan pengelolaan zakat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada berbagai isu program dalam pengelolaan zakat, pengumpulan, distribusi dan pengentasan kemiskinan yang dapat diselesaikan dengan kerangka waktu yang jelas.
9. Penelitian Ibrahim (2015: 437-441), menjelaskan peranan institusi zakat dalam menciptakan skema keamanan pengumpulan sosial untuk membantu masyarakat muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari kelompok intelektual, elit dan pimpinan lembaga dalam memberikan zakat sehingga dapat berkontribusi pada kehidupan sosial umat muslim melalui lembaga zakat.
10. Penelitian Zakaria, Maheran (2014: 165-173), menginvestigasi pengaruh kebutuhan manusia dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* yang meliputi fisik diri, pengetahuan, keluarga terhadap efektivitas zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebutuhan manusia dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* yang meliputi fisik diri, pengetahuan, keluarga terhadap efektivitas zakat.
11. Penelitian Shea (2010: 263-264), melihat persepsi konsumen terhadap panduan untuk strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen yang baik dapat dijadikan dasar sebagai strategi untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Penelitian Miles et al., (2006: 195-20), menjelaskan peranan strategi tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan kesejahteraan

stakeholders. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan secara global maupun lokal terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan strategi dan kebijakan institusi perusahaan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan peranan strategi perusahaan dalam memberikan kesejahteraan *stakeholders*.

13. Penelitian Bryan dan Allan (2006: 838-849), menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan secara global maupun lokal terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan strategi dan kebijakan institusi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan baik global dan lokal sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya melalui pendekatan strategi dan kebijakan institusi perusahaan yang baik.
14. Penelitian Galberth (2006: 175-187), bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara strategi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis melalui peran aktif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara strategi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis melalui peran aktif masyarakat.
15. Penelitian Tulberg (2005: 42), bertujuan untuk mengkaji peranan perusahaan melalui tanggung perusahaan kepada masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran perusahaan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimilikinya.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara struktur dengan rincian penulis, judul, tujuan, metode dan Rangkuman penelusuran hasil penelitian terdahulu secara skematis dapat dilihat tersusun secara lengkap pada pada Tabel 1.1 sebagaimana terinci di bawah:

Tabel 1.1 Rangkuman penelusuran hasil penelitian terdahulu.

No	Penulis, Judul dan Sumber	Tujuan	Metode	Hasil
1	Beik dan Arsyanti (2016), <i>Measuring Zakat Impact On Poverty and Welfare Using CIBEST Model</i> , Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, February 2016. pp. 141 – 160	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran produktivitas program zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan <i>mustahiq</i> (penerima zakat) dari perspektif dimensi spiritual dan material	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data interview dan kuesioner di wilayah DKI Jakarta dan Bogor. Responden yang digunakan sebanyak 221 responden penerima zakat BAZIS dan dompet dhuafa DKI Jakarta. Alat analisis adalah CIBEST Model.	Program zakat dari BAZIS dan Dompet Dhuafa DKI Jakarta memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi <i>mustahiq</i> . Tingkat spiritual <i>mustahiq</i> meningkat 13,09 persen; indeks kesejahteraan meningkat 96,8 persen dan indeks kemiskinan mengalami penurunan 30,15 persen.
2	Sarea (2012), <i>Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach</i> , International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 18, pp. 242 – 245	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan Zakat sebagai sistem keuangan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini dilakukan di Bahrain dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan analisis keuangan.	Zakat sebagai pembanding untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi terutama dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
3	Siswantoro dan Nurhayati (2012), <i>Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax Deduction in Indonesia</i> International Journal, Manajemen Bussiness, Resources. Vol 2 No. 4, pp. 293 – 312	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak di Indonesia.	Penelitian ini dilakukan dengan survei menggunakan pengumpulan data interview dan kuesioner di wilayah DKI Jakarta. Responden yang digunakan sebanyak 402 responden. Alat analisis yang digunakan structural equation modelling (SEM).	Faktor kepercayaan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Faktor kepuasan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Motivasi merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi responden untuk melakukan zakat.

- Usia, pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki hubungan positif dengan kemampuan membayar zakat.
- 4 Abdullah dan Suhaib (2011), *The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society*; Pakistan Journal of Islamic Research Vol 8, No. 3. pp. 85 – 91
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis akar penyebab di balik kinerja sistem zakat yang goyah dan mencoba untuk menghilang kan nya dengan merancang sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental
 Penelitian ini dilakukan dengan survei menggunakan pengumpulan data interview dan kuesioner di wilayah DKI Jakarta. Responden yang digunakan sebanyak 402 responden. Alat analisis yang digunakan structural equation modelling (SEM)
 Faktor kepercayaan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Faktor kepuasan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap preferensi untuk zakat sebagai deduksi pajak. Motivasi merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi responden untuk melakukan zakat. Usia, pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki hubungan positif dengan kemampuan membayar zakat.
 - 5 Noor et al., (2015) *Efficiency of Islamic Institutions : Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia* Journal of Economics, Business and Manajemen, Vol. 3, No. 2, February 2015
 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja multidimensional dari organisasi zakat. Dimensi tersebut meliputi input, proses, output dan outcome.
 Studi ini diukur menggunakan 303 responden didalam survei ini. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda untuk melihat perbandingan manfaat zakat diantara dua institusi zakat di Malaysia.
 Organisasi zakat melalui peningkatan kemampuan dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk peningkatan kualitas hidup.
 - 6 Yacoob *Zakat Disbursement via Capital Assistance: A Case Study of Majlis Agama Islam Johor*
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengelolaan zakat di wilayah Johor dan memfokus
 Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa
 Perbaikan manajemen zakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, prosedur dan kerjasama seluruh *stakeholders* dengan

- kan pada dokumentasi dan berbagai program distribusi laporan keuangan. yang dapat penerimaan zakat Analisis data mengurangi melalui menggunakan uji kemiskinan dan keterlibatan statistik deskriptif. mengoptimalkan program pengem- bangunan sosial penerimaan zakat.
- 7 Abdelbaki (2013) The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain Review of Integrative Business dan Economics Research Vol. 2 No. 1, pp. 133 – 154 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bahrain. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik regresi. zakat dapat menghilangkan kemiskinan di negara-negara muslim dan mencapai keadilan yang diinginkan dalam distribusi pendapatan serta berperan penting dalam memperbaiki kesehatan dan sanitasi.
- 8 Johari et al., (2015) A Review of Literatures on Current Zakat Issues: An Analysis Between 2003 – 2013 International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM) An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3200) 2015 Vol: 1, pp. 336 – 363 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengelolaan zakat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis isu zakat seperti manajemen, pengumpulan, distribusi dan pengurangan kemiskinan melalui zakat Hasil penelitian ini adalah ada berbagai isu program dalam pengelolaan zakat, pengumpulan, distribusi dan pengentasan kemiskinan yang dapat diselesaikan dengan kerangka waktu yang jelas
- 9 Ibrahim (2015), Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability International Journal of Manajemen and Commerce Innovations. Vol. 3, Issue 1, pp. 437 – 441. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan institusi zakat dalam menciptakan skema keamanan pengumpulan sosial untuk membantu masyarakat muslim Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis institusi zakat dalam menciptakan skema pengumpulan zakat untuk masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari kelompok intelektual, elit dan pimpinan lembaga dalam memberikan zakat sehingga dapat berkontribusi pada kehidupan sosial umat muslim melalui zakat.

- | | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 10 | Zakaria (2014), <i>The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness</i> Asian Social Science, Vol. 10, No. 3, pp. 165 – 173 | Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kebutuhan manusia dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah yang meliputi fisik diri, pengetahuan, keluarga terhadap efektivitas zakat | Penelitian ini menggunakan survei dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada 320 responden yang menjadi sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS. | Terdapat pengaruh kebutuhan manusia dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah yang meliputi fisik diri, pengetahuan, keluarga terhadap efektivitas zakat |
| 11 | Shea (2010), <i>Using Consumer Perceived Ethicality as a Guideline for Corporate Social Responsibility Strategy: a Commentary Essay</i> Journal of Business Research, 63 (2010) 263 – 264 | Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi konsumen terhadap panduan untuk strategi tanggung jawab sosial perusahaan | Penelitian ini dilakukan pada 20 partisipan di negara Inggris dan Jerman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan teknik analisis data menggunakan kualitatif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen yang baik dapat dijadikan dasar sebagai strategi untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. |
| 12 | Miles et al., (2006) <i>The Role of Strategic Conversations with Stakeholders in the Formation of Corporate Social Responsibility Strategy</i> Journal of Business Ethics (2006) 69: 195–205 | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan strategi tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan kesejahteraan <i>stakeholders</i> . | Penelitian ini dilakukan menggunakan survei dengan jumlah sampel sebanyak 210 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial peranan strategi perusahaan dalam memberikan kesejahteraan <i>stakeholders</i> . |
| 13 | Bryan dan Allan (2006), <i>Corporate social responsibility in the multinational enterprise: strategic and institutional approaches</i> . Journal of International Business Studies (2006) 37, 838–849 | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan secara global maupun lokal terhadap peningkatan kepercayaan | Jenis penelitian ini adalah survei. Sampel perusahaan yang digunakan sebanyak 89 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan | Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan baik global dan lokal sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya melalui |

		masyarakat melalui pendekatan strategi dan kebijakan institusi perusahaan.	analisis deskriminan.	pendekatan strategi dan kebijakan institusi perusahaan yang baik.
14	Galberth (2006) Corporate Social Responsibility Strategy: Strategic Options, Global Considerations Corporate Governance (2006) Vol. 6 No. 2. pp. 175 – 187	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara strategi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis melalui peran aktif masyarakat.	Penelitian menggunakan survei pada perusahaan di Australia. Sampel yang digunakan adalah 55 perusahaan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara strategi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis melalui peran aktif masyarakat
15	Tullberg (2005: 42) Reflections upon the responsive approach to corporate social responsibility Business Ethics: A European Review Volume 14 Number 3 July 2005	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	Penelitian merupakan penelitian eksplorasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran perusahaan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimilikinya

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sejenis yang telah dilakukan terdahulu sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pemberdayaan masyarakat melalui kinerja BAZNAS dalam pemberdayaan bidang kesehatan melalui program jambanisasi masyarakat dengan model pemanfaatan potensi bersama antara dana zakat, dana APBD dan bantuan dana CSR BANK JATENG menuju salah satu pilar sanitasi yaitu stop buang air besar sembarangan (BABS) dan layanan sedot lumpur tinja gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dengan model pendekatan kerja bareng, sedang orisinilitas/keaslian dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini yaitu:

1. Obyek penelitian: pemberdayaan masyarakat pada keluarga berpenghasilan rendah untuk peningkatan derajat kesehatan melalui program jambanisasi dan layanan sedot lumpur tinja gratis melalui konsep, prinsip, dan proses pemberdayaan masyarakat serta dikaji melalui teori efektivitas dan konsep perubahan perilaku.
2. Memaksimalkan potensi dana umat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Model pemberdayaan masyarakat berbasis kinerja BAZKAR dilaksanakan melalui strategi kerja bareng secara terpadu dengan program pemerintah dana APBD, dana zakat dan dana CSR BANK JATENG.

